




**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA**







**Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

**Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus**

Nomor SOP	OT.01.02-024-053.De.1
Tanggal Pembuatan	Rabu, 25 Oktober 2017
Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
Disahkan oleh	<p align="center">Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</p>  <p align="center">Janiruddin, S.H., M.Si        NIP. 195910081983031001</p>
<b>Judul SOP Mikro</b>	<b>Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus</b>

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019</li> <li>3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam</li> <li>4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019</li> <li>5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam</li> </ol>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Otonomi Khusus</li> <li>2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan</li> <li>3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik</li> <li>5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik</li> </ol>
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Otonomi Khusus</li> </ol>	<p>Peralatan/perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi</li> <li>2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li> <li>3. Kendaraan roda dua dan empat</li> <li>4. Telepon, Faksimile, dsb</li> </ol>
<p>Peringatan :</p> <p>Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus</p>	<p>Pencatatan dan pendataan :</p> <p>Disimpan dalam data elektronik dan manual</p>

**SOP Mikro Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Asdep	Kabid	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabid terkait dan Analis untuk menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Otonomi Khusus				Arahan Deputi, Rencana Kerja, dsb	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Otonomi Khusus				Disposisi/arahan Asdep	60 Menit	Koordinasi dan Konsultasi teknis + Disposisi	
3	Menyiapkan bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Otonomi Khusus kemudian disampaikan kepada Kabid untuk diperiksa				Koordinasi dan Konsultasi teknis + Disposisi	360 Menit	Bahan/materi	
4	Meneliti bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Otonomi Khusus, jika setuju dilaporkan kepada Asdep, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki				Bahan/materi	120 Menit	Bahan/materi yang telah diteliti	
5	Memeriksa bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus jika setuju dijadikan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk di diperbaiki				Bahan/materi yang telah diteliti	30 Menit	Bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus	